

DISKUSI PANEL "IDEOLOGI"
PPRA LX TAHUN 2020
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Lemhanas, Jakarta - 6 Juni 2020

**AKTUALISASI PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA**

Franz Magnis-Suseno

PENGANTAR

Indonesia sekarang terancam dari tiga sudut. Pertama dari virus Covid-19 - tapi tidak saya masuki di sini. Kedua dari pengorupsian kesadaran Indonesia-Pancasila oleh fokus perekonomian kapitalis pada *personal advancement*. Ketiga dari sudut ideologi keagamaan ekstrem-eksklusivis.

Personal advancement: Bahkan orang kecil harus berjuang keras agar ia, bersama keluarganya, dapat *survive*, gotong-royong tak bisa menyelamatkannya lagi. Sedangkan "kelas atas" semakin berfokus pada mencapai *success*, pada "menjadi orang". Bagi dua-duanya Keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila, tidak berfungsi dan tidak berarti. Fokus pada "sukses saya" melahirkan korupsi yang semakin mengancam kita. Peduli amat Indonesia, asal saya dapat "menjadi

orang". Sedangkan para ideolog agamis termakan hati oleh napsu menang sendiri dan napsu benci pada yang berbeda. Keindonesiaan tidak punya nilai bagi mereka.

Berikut ini saya (1) mau menunjukkan bahwa Pancasila sejak semula bermaksud mengatasi dua ancaman itu, (2) apa sikap inti Pancasila, dan (3) bagaimana Pancasila dapat diaktualisasikan dalam situasi sos-bud sekarang.

(1) FUNGSI PANCASILA

Jangan kaget dengan kata fungsi. Yang kita pertanyakan: Untuk apa Pancasila dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar filosofis Undang-undang Dasar kita. Secara sederhana. Pancasila adalah sarana mulia yang memungkinkan Indonesia bersatu. Sukarno pertama kali mencetuskan Pancasila bukan untuk menunjukkan kemampuan filosofisnya, melainkan untuk memecahkan masalah prinsipil dan struktural yang mengancam Indonesia bersatu. Yaitu: Indonesia menjadi negara agama -ya negara Islam,- atau negara nasional-sekuler? Sukarno menjawab: Dua-duanya tidak. Kita dapat menjamin dua-duanya: keagamaan, termasuk aspirasi mayoritas besar beragama Islam, maupun persatuan kebangsaan karena kita dapat mendasarkan diri pada lima sila yang kita miliki bersama. Tak perlu ada komunitas religius, maupun etnik dan budaya, yang harus menyangkal, mau mengebiri identitasnya demi Indonesia. Dengan menjadi Indonesia orang Jawa dapat tetap Jawa, orang Bugis te-

tap Bugis, orang Islam sepenuhnya dapat hidup menurut aspirasi-aspirasinya dan orang Katolik tetap bisa seratus persen Katolik. Kenyataan itu secara mengagumkan terbukti dalam kesediaan tokoh-tokoh Islam pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 untuk menarik kembali tujuh kata dari rumusan Pancasila yang sebelumnya sudah disepakati oleh Panitia Sembilan.

(2) SIKAP INTI YANG DIMINTA OLEH PANCASILA

Apa yang dicapai dengan Pancasila? Mengapa Pancasila memberikan kekuatan begitu luar biasa pada persatuan bangsa Indonesia? Padahal bangsa Indonesia adalah bangsa paling majemuk di dunia - dengan ratusan komunitas etnik, budaya dan agama, dengan identitas masing-masing? Jawabannya adalah: Karena identitas Indonesia, atas dasar Pancasila, tidak melindas, melainkan melindungi identitas masing-masing komunitas itu. Keindonesiaan tidak mengancam, melainkan mengangkat masing-masing komunitas dalam identitas mereka. Indonesia bisa mantap bersatu karena semua komunitas bangsa, di atas dasar Pancasila, oleh Keindonesiaan tidak diancam, melainkan dihormati.

Sebaliknya mental kapitalis mengancam Indonesia. Orang yang asal mau sukses sendiri akan "peduli amat dengan Pancasila". Karena satu-satunya nilai adalah kemajuannya sendiri, ia akan menganggap sepele korupsi, dan akhirnya "peduli amat" juga dengan Indonesia. Apakah sau-

dara dan saudara sebangsa lain bisa ikut atau ketinggalan "bukan tanggungjawab saya". Sikap ini menggerogoti baik identitas komunal maupun identitas nasional masyarakat kita.

Lebih jelas lagi ideologi-ideologi agamis. Ideologi-ideologi itu secara terbuka menolak dan langsung mengancam identitas komunitas-komunitas agama lain, secara tidak langsung juga identitas etnik dan budaya rakyat Indonesia. Keagamaan yang diizinkan hanya satu (dan bukan: hanya satu agama, melainkan dalam agama itu hanya satu cabang), dan kekayaan budaya masing-masing komunitas sekaligus dikafirkan.

Melawan dua ancaman itu, mental kapitalis dan ekstremisme agama, Pancasila menempatkan sikap paling mendasar: kita wajib saling menghormati dalam identitas masing-masing. Karena Pancasila, maka di Indonesia semua identitas komunal dilindungi. Itu membawa kewajiban moral penting bagi manusia Indonesia: ia harus menghormati manusia-manusia dan komunitas-komunitas dalam identitas mereka masing-masing. Menghormati tidak berarti mencampur-adukkan. Justru sebaliknya. Orang Katolik wajib menghormati identitas Protestan, orang Jawa menghormati identitas khas Batak, orang Indonesia ras Melayu menghormati identitas ras Melanesia saudara-saudari di Indonesia Timur. Dan sebaliknya.

Maka, dan ini penting: Dalam segala macam pendidikan, informal dan formal, dalam pengarahan oleh para pemimpin, pemimpin politik, panutan intelektual dan budaya, tokoh dan guru agama kewajiban dasar untuk saling menerima dan saling menghormati harus mendapat tempat kunci. Perlu diperhatikan bahwa -ya memang demikian Pancasila- tuntutan itu bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Sejak ribuan tahun manusia Nusantara biasa dengan kemajemukan -beda misalnya dengan orang Jerman. Ia tahu dan mengalami bahwa di dekatnya ada orang dengan bahasa, adat, potongan hidung dan orientasi keagamaan yang berbeda - dan tanpa kesulitan berkomunikasi, berurusan, berdagang dengan dia. Baru modernitas dengan tekanan-tekanan ekonomis dan ideologis mengancam kemampuan untuk bersikap positif terhadap kemajemukan itu.

Jadi ini sudah suatu kesimpulan amat penting: Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, dengan segala perbedaan budaya dan sosial - yang semakin menjadi-jadi dalam arus modernisasi - berarti memelihara, menumbuhkan dan memperkuat kesediaan untuk saling menerima *dalam perbedaan*. Dulu kita bisa, sekarang pun kita harus bisa - meskipun persaingan keras yang menjadi kenyataan kehidupan sehari-hari bagi semakin banyak masyarakat, dan hasutan kaum agamis ekstrem mengancamnya.

Maka sekali lagi: melawan tekanan persaingan ekonomis dan hasutan ideologis kita harus secara sadar dan eks-

plisit menuntut, mendukung dan mengembangkan sikap saling menghormati dalam perbedaan. Dapat ditambah di sini bahwa pemasukan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar kita melalui amendemen pasca reformasi amat sangat mendukung tuntutan dasar Pancasila ini: Kita harus saling menghormati dalam semua dimensi yang hakiki bagi identitas kita masing-masing.

(3) AKTUALISASI LIMA SILA PANCASILA

Dalam arti tertentu sila pertama adalah sila kunci yang mengungkapkan apa yang diharapkan dari Pancasila: Bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua komunitas berketuhanan - betapa pun mereka berbeda. Sila itu juga mencegah suatu salah paham. Seperti hampir setiap negara modern Indonesia memisahkan antara negara dan agama. Tetapi itu tidak berarti bahwa Indonesia adalah negara sekuler. Itu hanya berarti bahwa Indonesia tidak didasarkan atas satu agama saja - hal mana akan membuat warga komunitas agama lain menjadi warganegara kelas dua. Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia tetap, dan memang, negara religius, artinya negara yang melihat keagamaan masyarakat sebagai nilai tinggi yang perlu dilindungi dan diberi dukungan. Mari kita melihat sila-sila lain.

Dalam itu kita dapat dibantu kalau kita memperhatikan bahwa pada hakekatnya Pancasila adalah (1) nilai-nilai paling dasar (nilai = apa yang dijunjung tinggi, paling dihar-

gai), (2) cita-cita (apa yang mau, dan memang masih harus dicapai) dan (3) tolok-ukur (kriteria) perpolitikan Indonesia.

Jadi Pancasila itu pertama-tama suatu etika politik. Yang harus Pancasilais adalah kehidupan politik bangsa Indonesia. Artinya struktur konstitusional, perundang-undangan (legislasi) dan pengambilan keputusan (eksekutif) negara Indonesia. Masyarakat sudah mendapat kesadaran etika di rumah dan di lingkungan, jauh sebelum mendengar ada Pancasila, dan Pancasila hanya akan berarti bagi mereka kalau mereka sudah menjadi manusia beretika. Tetapi negaralah wajib memastikan bahwa segenap undang-undang dan peraturan, serta segenap keputusan politik akhirnya memajukan realisasi cita-cita Pancasila.

Sila pertama -karena agama begitu penting dalam kehidupan masyarakat- merupakan kunci. Maka masyarakat harus terus menerus dibantu, diarahkan, didukung ke arah toleransi. Bahwa negara kita tidak memberikan perlindungan terhadap komunitas-komunitas beragama yang tidak termasuk enam agama yang resmi diakui adalah tak kurang suatu skandal. Mana masyarakat bisa diminta toleran, kalau orang dibiarkan diusir dari rumah, tempat ibadatnya dibiarkan dibakar, karena keagamaan mereka? Peristiwa Mempawah empat tahun lalu teramat memalukan. Masalah intoleransi bukan pertama-tama masalah masyarakat, me-

lainkan masyarakat bingung karena alat negara tidak berani memberi perlindungan hukum.

Kiranya sila yang menentukan adalah sila kelima, *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Rakyat harus merasakan bahwa usaha membebaskan mereka yang masih terikat kemiskinan, dan untuk betul-betul membuat sejahtera seluruh masyarakat nyata-nyata mendapat prioritas. Sekarang, dipandemi covid-19 masyarakat akan dengan tajam menilai: Apakah seluruh dana yang dapat dikuasai pemerintah betul-betul dipergunakan untuk menjamin bahwa tidak ada orang Indonesia kelaparan? Semua proyek yang tidak hakiki harus disingkirkan demi keselamatan jutaan, kalau bukan puluhan juga saudara dan saudari sebangsa yang hancur perekonomian karena virus corona. Tentu masyarakat juga terus bertanya: Kapan 50 persen berpendapatan rendah akan bisa merasakan bahwa *basic needs* mereka -sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan- betul-betul terjamin? Kekacauan BPJS - kita masih belum berhasil memberi jaminan dasar kesehatan kepada senegap warga, -tetapi juga skandal Jiwasraya daripadanya masa depan sekian orang kecil terasuransi tergantung- merupakan tantangan serius bagi pemerintah kita. Kalau masyarakat merasa ditangani secara adil bisa diharapkan bahwa radikalisme agama akan tetap merupakan gejala sampingan.

Dari sudut masyarakat sila kelima tentu berarti solidaritas. Tradisi gotong-royong perlu dikembangkan menjadi

solidaritas kita masing-masing dengan saudara dan saudari sebangsa yang lemah, miskin, ketinggalan. Solidaritas adalah aktualisasi sila kelima Pancasila.

Menurut alm. Prof. Nikolas Drijarkara sila paling dasar adalah sila kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Mengapa? Kiranya karena di satu pihak empat sila lain kalau dilakukan secara tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, tidak lagi merupakan nilai, melainkan kejahatan. Bahwa keagamaan yang tidak beradab merupakan ancaman, kita tahu semua. Kebangsaan yang tidak manusiawi dan adil menjadi *chauvinisme*, kerakyatan yang tidak adil dan tidak beradab menjadi kediktatoran mayoritas, dan keadilan kalau diperjuangkan secara tidak manusiawi menjadi legitimasi ideologi kebencian. Dan di lain pihak, bersikap manusiawi, adil dan beradab dalam kondisi apa pun adalah positif.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi negara berarti pertama-tama dua hal: Nir-toleransi terhadap kekerasan, dan perlindungan efektif terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam negara beradab tidak ada ruang bagi kekerasan. Monopoli kekerasan ada di tangan negara, melalui alat negara dan atas dasar hukum. Negara yang mengizinkan kekerasan, misalnya mundur terhadap *massa beringas* mensabotase sendiri wibawanya. Dengan memastikan bahwa segala proses dalam masyarakat terjadi dengan menghormati

hak-hak asasi manusia negara menjadi beradab dan mendapatkan persetujuan dasar seluruh masyarakat.

Aktualisasi sila kedua dalam masyarakat sama saja: masyarakat dibina dan diarahkan untuk menolak segenap kekerasan, dan masyarakat dibina untuk menghormati identitas dan keutuhan segenap sesama. Di mana sangat penting prasangka-prasangka rasial tidak diizinkan berkembang, jadi masyarakat harus dibina untuk menerima keanekaan. Hal mana harus dilatih di seluruh masa sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bersama di desa dan kampung.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tak lain menuntut agar demokrasi kita dilindungi dan diperbaiki. Tak ada alternatif terhadap demokrasi. Pemerintahan feodal, teknokrasi, kediktatoran militer, otoritarianisme: semua itu dijangka panjang tidak stabil. Suatu sistem kekuasaan hanyalah stabil apabila ditetapkan dan didukung oleh mereka yang dikuasai. Itulah demokrasi. Aktualisasi terjadi juga dalam menjamin, daripada membatasi, kebebasan-kebebasan demokratis: kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mengkritik penguasa, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi. Itu tentu beban di pundak penguasa.

Tetapi sikap-sikap demokratis perlu, dan dapat didukung dalam masyarakat dalam pelbagai bentuk. Yang paling

kunci -dan masih amat sangat kurang- adalah sistem pendidikan formal yang menjauhi cara tradisional, yaitu model otoriter isi botol. Yang harus digantikan dengan pendidikan dialogal di mana siswa sejak kelas pertama dilatih dan diberi semangat untuk bertanya, didukung kalau menyatakan pendapatnya. Daripada disuruh menghapuskan siswa diajak untuk mempertanyakan. Tentu itu juga berlaku di antara orang dewasa. Orang dalam kedudukan tergantung tetap diberi semangat untuk bertanya, untuk mengusulkan perbaikan, untuk mengajukan kritik. Otoritas tidak boleh dibawa secara otoriter, melainkan secara diskursif, dalam komunikasi timbal-balik.

Persatuan Indonesia dari sudut negara cukup jelas. Aktualisasi dalam masyarakat tentu berarti bahwa masyarakat dibantu -tidak sama dengan dikuliahi- agar betul-betul merasa Indonesia, mencintai bangsa dan negara, merasa dalam hati kesediaan untuk, tentu secara adil, berkorban bagi keselamatan negaranya. Ini pertanyaan besar, dan kunci untuk melawan ideologi ekstremis: Bagaimana sehingga orang betul-betul bangga bahwa dia orang Indonesia, ikut merasakan sebagai orang Indonesia, bersedia memberi sumbangannya bagi keselamatan dan kemajuan Indonesia.

KESIMPULAN

Inti aktualisasi Pancasila adalah kesediaan untuk saling menerima dalam identitas masing-masing, jadi justru dalam keberlainan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan karena itu hanya akan bersatu kalau kemajemukan itu tidak mau dihilangkan, melainkan dihormati. Dan itu berarti sesuatu yang amat mendalam: Bersedia menerima segenap manusia lain dalam kediriannya, sesuai dengan identitasnya. Saudara dan saudara sebangsa lain harus dapat selalu merasa terlindung pada kita.

